

Nomor : 479/DJKP.2/IK.01.02/02/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Imbauan Diseminasi Sosialisasi IKN

Jakarta, 23 Februari 2024

Kepada Yth.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi/Kabupaten/Kota

(sesuai daftar terlampir)

di tempat

Seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terus berjalan, perlu dilakukan amplifikasi secara terus-menerus kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap keberadaan dan program IKN. Sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo bersama dengan Pemerintah Daerah sudah seharusnya menjadi salah satu penyedia informasi utama mengenai program prioritas pemerintah.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara turut serta menyebarluaskan konten terkait profil IKN pada media videotron yang dikelola oleh Dinas Kominfo atau Pemda secara umum. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, dapat juga ditayangkan di seluruh kanal resmi, baik di media sosial, maupun media online yang dikelola.

Materi videotron dan formulir pelaporan penayangan dapat diunduh dan diakses melalui <https://komin.fo/brandingIKN> dengan waktu penayangan yang dimulai dari 26 Februari – 26 Maret 2024. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Yoko 0812-8935-8537.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Gubernur, Bupati, Walikota di seluruh Indonesia;
2. Sekjen Kementerian Kominfo; dan
3. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik.

Lampiran Surat : Imbauan Diseminasi
Sosialisasi IKN
Nomor : 479/DJIKP.2/IK.01.02/02/2024
Tanggal : 23 Februari 2023

Daftar Instansi

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, Kabupaten/ Kota di wilayah:

1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Sumatra Utara
3. Provinsi Sumatra Barat
4. Provinsi Riau
5. Provinsi Kepulauan Riau
6. Provinsi Jambi
7. Provinsi Bengkulu
8. Provinsi Sumatra Selatan
9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10. Provinsi Lampung
11. Provinsi Banten
12. Provinsi Jawa Barat
13. Provinsi DKI Jakarta
14. Provinsi Jawa Tengah
15. Provinsi D I Yogyakarta
16. Provinsi Jawa Timur
17. Provinsi Bali
18. Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Provinsi Nusa Tenggara Timur
20. Provinsi Kalimantan Barat
21. Provinsi Kalimantan Selatan
22. Provinsi Kalimantan Tengah
23. Provinsi Kalimantan Timur
24. Provinsi Kalimantan Utara
25. Provinsi Gorontalo
26. Povinsi Sulawesi Barat
27. Provinsi Sulawesi Tengah
28. Provinsi Sulawesi Tenggara
29. Provinsi Sulawesi Selatan
30. Provinsi Sulawesi Utara
31. Provinsi Maluku
32. Provinsi Maluku Utara
33. Provinsi Papua
34. Provinsi Papua Barat
35. Provinsi Papua Barat Daya
36. Provinsi Papua Pegunungan
37. Provinsi Papua Selatan
38. Provinsi Papua Tengah

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**